



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Maret 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNIT KERJA : KECAMATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HENI ERNAWATY
2. Jabatan : SEKRETARIS CAMAT
3. NHK : 761695

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.282.000.000

1. Tanah Seluas 1.475 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 147.500.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 168 m2/192 m2 di KAB / KOTA KOTA MATARAM , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
3. Tanah Seluas 469 m2 di KAB / KOTA KOTA MATARAM , HASIL SENDIRI Rp. 234.500.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 400 m2/142 m2 di KAB / KOTA LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 108.500.000

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
4. MOTOR, HONDA ASTREA PRIMA Tahun 1990, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000
5. MOTOR, HONDA PCX Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 37.450.000

D. SURAT BERTAHAPAN Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 229.734.068



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.657.684.068
III. HUTANG	Rp.	12.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.645.684.068

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.